



# EFEKTIVITAS DANA DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN ACEH TENGGARA

**Ary Syafrizal Arma<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Department of Regional Development  
Planning,  
University of Sumatera Utara,  
North Sumatra,  
Indonesia

**Sirojuzilam<sup>2</sup>**

<sup>2</sup>Department of Regional Development  
Planning,  
University of Sumatera Utara,  
North Sumatra,  
Indonesia

**Tarmizi<sup>3</sup>**

<sup>3</sup>Department of Regional Development  
Planning,  
University of Sumatera Utara,  
North Sumatra,  
Indonesia

---

## ABSTRACT

*Penggunaan dana desa oleh pemerintah desa harus digunakan secara efektif agar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui musyawarah dapat tercapai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan karena efektivitas suatu program atau kegiatan yang dijalankan suatu organisasi atau kelompok berimplikasi pada capaian atau hasil yang diperoleh. Penelitian ini bertujuan mengetahui efektivitas Dana Desa di Kabupaten Aceh Tenggara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas Program Dana Desa di Kabupaten Aceh Tenggara berada pada interpretasi efektif, dan dapat dinyatakan bahwa pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Aceh Tenggara sudah efektif, namun masih belum terlaksana dengan maksimal karena masih belum dalam interpretasi sangat efektif.*

**KEYWORDS:** *Efektivitas, dana desa, pengembangan wilayah*

---

## 1. INTRODUCTION

Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa memberikan kepastian, selain pemberian kewenangan kepada desa juga diberikan Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga mendapat alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Dana Desa tersebut telah disalurkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Setelah disalurkan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) bertugas mengawal prioritas penggunaan Dana Desa agar sesuai dengan Peraturan Menteri yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Kabupaten Aceh Tenggara merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kabupaten Aceh Tenggara telah mengalokasikan Dana Desa sejak tahun 2015 dengan harapan pembangunan semakin merata sampai ke tingkat desa. Alokasi Dana Desa di Kabupaten Aceh Tenggara digunakan untuk pembangunan infrastruktur, sosial dan budaya, sehingga dengan adanya pembangunan tersebut akan menambah pendapatan bagi masyarakat desa di Kabupaten Aceh Tenggara.



**Tabel 1**  
**Jumlah Dana Desa tahun 2016-2018 di Kabupaten Aceh Tenggara**

No	Tahun	Jumlah Dana Desa (Rp)
1.	2015	302.843.287.000
2.	2016	306.712.093.000
3.	2017	346.782.098.000
4.	2018	402.756.768.800

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Aceh Tenggara

Penggunaan dana desa yang dialokasikan untuk bidang pembangunan adalah sebesar 70% dan biaya yang dialokasikan untuk operasional desa tidak melebihi 30%. Penggunaan dana desa oleh pemerintah desa harus digunakan secara efektif agar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui musyawarah dapat tercapai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan karena efektivitas suatu program atau kegiatan yang dijalankan suatu organisasi atau kelompok berimplikasi pada capaian atau hasil yang diperoleh. Penelitian ini penting untuk dilakukan sehingga memberikan gambaran sejauh mana pelaksanaan Dana Desa dalam rangka pengembangan wilayah baik berupa infrastruktur, sosial dan budaya di desa khususnya di kecamatan-kecamatan Kabupaten Aceh Tenggara.

## 2. RESEARCH METHODOLOGY

Jenis penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tulisan dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti (Bagong Suyanto, 2006:5). Penelitian dilakukan di Kabupaten Aceh Tenggara yang merupakan salah satu daerah penerima Dana Desa. Wawancara dilakukan dengan bertemu langsung masyarakat responden untuk menggali informasi secara mendalam melalui pokok-pokok pertanyaan yang dijadikan pegangan peneliti. Skoring dilakukan terhadap jawaban dari responden terhadap item pertanyaan dalam kuesioner (angket). Dalam pemberian bobot dan scoring digunakan skala Likert.

**Tabel 2**  
**Kriteria Interpretasi Skor**

Kelas	Kriteria Interpretasi	Kategori	Nilai
1	81% - 100%	Sangat Efektif	5
2	61% - 80%	Efektif	4
3	41% - 60%	Cukup Efektif	3
4	21% - 40%	Kurang Efektif	2
5	0% - 20%	Tidak Efektif	1

Sumber: Johan (2012)

## 3. LITERATURE REVIEW

Makmur (2011: 5) mengungkapkan bahwa efektivitas berhubungan dengan tingkat kebenaran atau keberhasilan dan kesalahan. Siagian (2005:24) berpendapat bahwa efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar di tetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektifitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan output yang dicapai output yang di harapkan dari sejumlah input. Suatu pekerjaan dapat dilaksanakan secara tepat, efektif, efisien apabila pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan tepat sesuai dengan yang telah direncanakan.

Menurut Cambel J.P (1989:121), Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol dengan melihat pada keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, dan pencapaian tujuan menyeluruh. UU No. 6/2014 tentang Desa telah menempatkan desa sebagai organisasi campuran (*hybrid*) antara masyarakat berpemerintahan (*self*

*governing community*) dengan pemerintahan lokal (*local self government*), sehingga desa berbentuk pemerintahan masyarakat atau pemerintahan berbasis masyarakat. Desa tidak berkedudukan sebagai pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 200 UU No. 32/2004. Menurut UU No. 6/2014, desa berkedudukan dalam wilayah kabupaten/kota. Hal ini sama sebangun dengan keberadaan kabupaten/kota dalam wilayah provinsi.

Zamroni, dkk (2015) menyebutkan bahwa Pemerintah Desa yang mempunyai integritas dan visi membangun kesejahteraan bersama. UU Desa yang didukung PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan PP No. 60 tentang, Dana Desa yang Bersumber dari APBN, telah memberikan fondasi dasar terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.





Kabupaten Aceh Tenggara memiliki wilayah seluas 4.231,41 km<sup>2</sup> dengan batas-batas wilayah adalah sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara; sebelah selatan berbatasan dengan Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Selatan dan

Kabupaten Tanah Karo Provinsi Sumatera Utara; sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Langkat dan Tanah Karo Provinsi Sumatera Utara; sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Selatan dan Kota Subulussalam.

**Tabel 3**  
**Karakteristik Responden**

Variabel	Kategori	Frequency	Precentage
Umur	30-40	32	31,00
	41-50	43	42,00
	51-60	25	27,00
Pendidikan	SD	12	13,00
	SMP	33	32,00
	SMA	42	40,00
	D1/D3/S1	13	15,00
Jenis Kelamin	Laki-laki	84	84,00
	Perempuan	16	16,00

Sumber: Data Primer diolah, 2020

Distribusi jawaban responden mengenai efektivitas Dana Desa di Wilayah Kabupaten Aceh Tenggara dapat dilihat pada Tabel 4.

**Tabel 4**  
**Distribusi Jawaban Responden mengenai Efektivitas Program Dana Desa**

No	Variabel	Jawaban Responden					Persentase						
		SS	S	CS	KS	TS	Jlh	SS	S	CS	KS	TS	Jlh
1	Kejelasan tujuan yang hendak dicapai	52	47	1			100	52	47	1			100
2	Kejelasan strategi pencapaian tujuan	53	40	7			100	53	40	7			100
3	Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap	53	43	4			100	53	43	4			100
4	Perencanaan yang matang	45	50	5			100	45	50	5			100
5	Penyusunan program yang tepat	53	35	12			100	53	35	12			100
6	Tersedianya sarana dan prasarana kerja	56	38	6			100	56	38	6			100
7	Pelaksanaan yang efektif dan efisien	54	35	11			100	54	35	11			100
8	Sistem pengawasan dan pengendalian	37	57	6			100	37	57	6			100
	Rataan	50	43	7			100	50	43	7			100

Sumber: Data Primer diolah, 2019

Tabel 4 menunjukkan bahwa rata-rata tanggapan responden yang menjawab setuju mengenai keseluruhan indikator efektivitas Dana

Desa sebanyak 50 orang (50%), cukup setuju sebanyak 43 orang (43%) dan kurang setuju sebanyak 7 orang (7%).



Dari hasil perhitungan yang dipresentasikan didapatkan bahwa secara keseluruhan instrumen indikator efektivitas Dana Desa (Lampiran 2) yang

diteliti menunjukkan nilai presentase seperti yang terlihat pada Tabel 5.

**Tabel 5**  
**Efektivitas Program Dana Desa di Kabupaten Aceh Tenggara**

No	Variabel	Efektivitas Persen (%)	Efektivitas Program
1	Kejelasan tujuan yang hendak dicapai	70,20	
2	Kejelasan strategi pencapaian tujuan	69,20	
3	Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap	69,80	
4	Perencanaan yang matang	68,00	<b>68,78</b>
5	Penyusunan program yang tepat	68,20	
6	Tersedianya sarana dan prasarana kerja	70,00	
7	Pelaksanaan yang efektif dan efisien	68,60	
8	Sistem pengawasan dan pengendalian	66,20	

Sumber: Data Primer diolah, 2019

Hasil pada Tabel 5 jika diinterpretasi pada Tabel 2 mengenai kriteria interpretasi skor maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Indikator kejelasan tujuan yang hendak dicapai diperoleh hasil 70,20% . Hasil ini berdasarkan kriteria interpretasi skor termasuk dalam kriteria 61-80% yang menunjukkan bahwa kejelasan tujuan yang hendak dicapai Program Dana Desa di Kabupaten Aceh Tenggara termasuk dalam kategori efektif.
2. Indikator kejelasan strategi pencapaian tujuan diperoleh hasil 69,20% . Hasil ini berdasarkan kriteria interpretasi skor termasuk dalam kriteria 61-80% yang menunjukkan bahwa kejelasan strategi pencapaian tujuan Program Dana Desa di Kabupaten Aceh Tenggara termasuk dalam kategori efektif.
3. Indikator proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap diperoleh hasil 69,80% . Hasil ini berdasarkan kriteria interpretasi skor termasuk dalam kriteria 61-80% yang menunjukkan bahwa proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap Program Dana Desa di Kabupaten Aceh Tenggara termasuk dalam kategori efektif.
4. Indikator perencanaan yang matang diperoleh hasil 69,00% . Hasil ini berdasarkan kriteria interpretasi skor termasuk dalam kriteria 61-80% yang menunjukkan bahwa perencanaan yang matang Program Dana Desa di Kabupaten Aceh Tenggara termasuk dalam kategori efektif.
5. Indikator penyusunan program yang tepat diperoleh hasil 68,20% . Hasil ini berdasarkan kriteria interpretasi skor termasuk dalam kriteria 61-80% yang menunjukkan bahwa penyusunan program yang tepat Program Dana

Desa di Kabupaten Aceh Tenggara termasuk dalam kategori efektif.

6. Indikator tersedianya sarana dan prasarana kerja diperoleh hasil 70,00% . Hasil ini berdasarkan kriteria interpretasi skor termasuk dalam kriteria 61-80% yang menunjukkan bahwa tersedianya sarana dan prasarana kerja Program Dana Desa di Kabupaten Aceh Tenggara termasuk dalam kategori efektif.
7. Indikator pelaksanaan yang efektif dan efisien diperoleh hasil 68,60% . Hasil ini berdasarkan kriteria interpretasi skor termasuk dalam kriteria 61-80% yang menunjukkan bahwa pelaksanaan yang efektif dan efisien Program Dana Desa di Kabupaten Aceh Tenggara termasuk dalam kategori efektif.
8. Indikator sistem pengawasan dan pengendalian diperoleh hasil 66,20% . Hasil ini berdasarkan kriteria interpretasi skor termasuk dalam kriteria 61-80% yang menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan pengendalian Program Dana Desa di Kabupaten Aceh Tenggara termasuk dalam kategori efektif.

## 5. DISCUSSION

### Efektivitas Dana Desa di Kabupaten Aceh Tenggara

Upaya mengevaluasi jalannya suatu program, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan



personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.

Kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh Siagian (2005), yaitu: 1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai. Hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai, 2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan. Telah diketahui bahwa strategi adalah "pada jalan" yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi, 3) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap. berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional, 4) Perencanaan yang matang. Pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi di masa depan, 5) Penyusunan program yang tepat. Suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja, 6) Tersedianya sarana dan prasarana kerja. Salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi, 7) Pelaksanaan yang efektif dan efisien. Bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya, dan 8) Sistem pengawasan dan pengendalian. Bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Rataan efektivitas Dana Desa di Kabupaten Aceh Tenggara menunjukkan sebesar 68,78 termasuk dalam kategori efektif berdasarkan kriteria interpretasi skor. Indikator kejelasan tujuan yang hendak dicapai diperoleh hasil 70,20%, hasil ini berdasarkan kriteria interpretasi skor termasuk dalam kriteria 61-80% yang menunjukkan bahwa kejelasan tujuan yang hendak dicapai Program Dana Desa di Kabupaten Aceh Tenggara termasuk dalam kategori efektif. Indikator kejelasan strategi pencapaian tujuan diperoleh hasil 69,20%, hasil ini berdasarkan kriteria interpretasi skor termasuk dalam kriteria 61-80% yang menunjukkan bahwa kejelasan

strategi pencapaian tujuan Program Dana Desa di Kabupaten Aceh Tenggara termasuk dalam kategori efektif.

Indikator proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap diperoleh hasil 69,80%, hasil ini berdasarkan kriteria interpretasi skor termasuk dalam kriteria 61-80% yang menunjukkan bahwa proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap Program Dana Desa di Kabupaten Aceh Tenggara termasuk dalam kategori efektif. Indikator perencanaan yang matang diperoleh hasil 68,00%, hasil ini berdasarkan kriteria interpretasi skor termasuk dalam kriteria 61-80% yang menunjukkan bahwa perencanaan yang matang Program Dana Desa di Kabupaten Aceh Tenggara termasuk dalam kategori efektif.

Indikator penyusunan program yang tepat diperoleh hasil 68,20%, hasil ini berdasarkan kriteria interpretasi skor termasuk dalam kriteria 61-80% yang menunjukkan bahwa penyusunan program yang tepat Program Dana Desa di Kabupaten Aceh Tenggara termasuk dalam kategori efektif. Indikator tersedianya sarana dan prasarana kerja diperoleh hasil 70,00%, hasil ini berdasarkan kriteria interpretasi skor termasuk dalam kriteria 61-80% yang menunjukkan bahwa tersedianya sarana dan prasarana kerja Program Dana Desa di Kabupaten Aceh Tenggara termasuk dalam kategori efektif.

Indikator pelaksanaan yang efektif dan efisien diperoleh hasil 68,60%, hasil ini berdasarkan kriteria interpretasi skor termasuk dalam kriteria 61-80% yang menunjukkan bahwa pelaksanaan yang efektif dan efisien Program Dana Desa di Kabupaten Aceh Tenggara termasuk dalam kategori efektif. Indikator sistem pengawasan dan pengendalian diperoleh hasil 66,20%, hasil ini berdasarkan kriteria interpretasi skor termasuk dalam kriteria 61-80% yang menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan pengendalian Program Dana Desa di Kabupaten Aceh Tenggara termasuk dalam kategori efektif. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapainya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Efektivitas berhubungan dengan tingkat kebenaran atau keberhasilan dan kesalahan. Untuk menentukan tingkat efektivitas keberhasilan seseorang, kelompok, atau organisasi harus melakukan perbandingan antara kebenaran atau ketepatan dengan kekeliruan atau yang dilakukan. Semakin rendah tingkat kekeliruan atau kesalahan yang terjadi, tentunya akan semakin mendekati ketepatan dalam pelaksanaan setiap aktivitas atau pekerjaan (tugas) yang dibebankan setiap orang (Makmur, 2011: 5)



## 6. CONCLUSION

Beberapa alternatif strategi yang dapat dilakukan dalam pencapaian perolehan pajak adalah : 1) Mengoptimalkan program intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah; 2) Melakukan pendataan secara efektif; 3) Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian pemunguttan pajak kendaraan bermotor; 4) Penertiban sistem dan prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor; 5) Meningkatkan kualitas SDM yang belum memadai dengan mengusahakan pelatihan bidang perpajakan secara berkala dan pemutakhiran data, untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan agar bisa memberikan pelayanan yang optimal; 6) Adanya Tim Pembina Pajak di setiap UPT; 7) Meningkatkan partisipasi wajib pajak; 8) Meningkatkan pengawasan dan evaluasi kepada para wajib pajak; 9) Pembuatan peraturan daerah yang jelas dan berkekuatan hukum; 10) Koordinasi antar aparat; 11) Meningkatkan sosialisasi, dan 12) Penerapan pajak online

## REFERENCE

1. Adisasmita, Rahardjo. 2014. *Pertumbuhan Wilayah dan Wilayah Pertumbuhan*. Yogyakarta : Penerbit Graha Ilmu.
2. Dakelan, M. Huda., Achmad M. Haris dan Aji Dahlan. 2016. *Mewujudkan Desa Inklusif (Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif Pro Poor dan Responsif Gender)*. Jakarta : Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia
3. Eko, Sutoro. 2016. *Regulasi Baru, Desa Baru : Ide, Misi, dan Semangat UU Desa*. Jakarta : kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, Dan transmigrasi republik indonesia
4. Indrawati, Sri Mulyani. 2017. *Buku Pintar Dana Desa*. Jakarta : Kementerian Keuangan RI.
5. Johan. K. 2012. *Efektivitas Program Dana Bergulir Bagi UKM dalam Pemberdayaan Ekonomi (Studi pada UKM Binaan Dinas Koperasi, Kota Surabaya)*. *Jurnal Efektifitas Program Dana Bergulir*. Vol. 01, No. 01. Universitas Negeri Surabaya. Surabaya.
6. Juwono, Tri Pitojo dan Subagiyo, Aris. 2018. *Sumber Daya Air dan Pengembangan Wilayah*. Malang : Penerbit UB Press.
7. Kessa, Wahyudin. 2015. *Perencanaan Pembangunan Desa*. Jakarta : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia
8. Kurnia, Dadang. 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta : Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan
9. Mahi, Ali Kabul 2016. *Pengembangan Wilayah : Teori & Aplikasi*, Jakarta : Kencana.
10. Palupi, Sri, Ufi Ulfiah, Prasetyohadi, Yulia Sri Sukpti dan Sabik Al Fauzi, 2016, *Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak*, Jakarta : Lakpesdam PBN (Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama)
11. Soemarwoto, Suharyono, 2018, *Catatan Penting Ke-Indonesia Kita*, Yogyakarta : Penerbit Deepublish.
12. Sumpeno, Wahjudin, 2011, *Perencanaan Desa Terpadu*, Banda Aceh : Penerbit Read (Reinforcement Action and Development)
13. Zamroni, Sunaji, M. Zainal Anwar, Sugeng Yulianto, Abdur Rozaki, Ashari Cahyo Edi, 2015, *Desa Mengembangkan Penghidupan Berkelanjutan*, Yogyakarta : Penerbit IRE